

BAB III

KEADAAN KOREA SELATAN SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS MONETER ASIA DI TAHUN 1997

Pada tanggal 11 Oktober tahun 1996, Korea Selatan bersemangat tinggi karena Korea Selatan baru dikategorikan sebagai negara maju bidang ekonomi dengan menjadi anggota Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD. Namun, satu tahun kemudian, krisis moneter yang melanda Korea Selatan memberikan dampak dahsyat bagi seluruh masyarakat Korea Selatan.

Setelah itu, berbagai perusahaan besar juga turut menjadi bangkrut. Akibat bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar, maka dunia keuangan juga mengalami kesulitan, sampai tidak bisa membayar dana yang dipinjam dari luar negeri. Karenanya, cadangan devisa turun drastis, dan bank juga menghadapi krisis bangkrut. Selain itu, krisis ekonomi di Asia Timur membuat perekonomian Korea Selatan menjadi lebih sulit.

A. Keadaan Korea Selatan Sebelum Krisis Moneter

Korea Selatan memiliki sejarah yang panjang dan berliku dalam mencapai keberhasilan perkembangan ekonomi. Pada tahun 1950 hingga awal tahun 1960-an, Korea memiliki sistem ekonomi dan politik yang tidak menentu, birokrasi saat itu sangat buruk, hal ini terbukti dengan banyaknya kasus kolusi yang dilakukan oleh para pengusaha dan birokrat. Hingga akhirnya pemerintahan tersebut dikudeta dan digantikan oleh Park Chung Hee pada 1961. Park dalam hal ini mengambil beberapa kebijakan yang cukup membuat Korea maju dalam pembangunan ekonominya, melalui *sistem exportoriented industrialization* (EOI).

Pemerintah juga mencanangkan pembangunan lima tahun dengan implementasi yang baik dengan menciptakan lembaga yang memiliki peran signifikan dalam urusan ekonomi politik negara tersebut, yaitu membentuk *Korean Central Intelligence Agency* (KCIA) dan *Economic Planning Board*, menciptakan birokrasi yang bersih. Birokrasi di Korea ditandai dengan;

1. Profesionalisme dan memiliki kemampuan dalam menangani persoalan ekonomi.
2. Tidak terafiliasi dalam ideologi atau partai politik tertentu dan hanya berorientasi pada target pembangunan tertentu.
3. Secara material independen dari sektor bisnis.
4. Tingkat korupsi dilapangan relatif rendah.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Korea melesit pada saat kepemimpinan Park namun nyatanya pertumbuhan tersebut tidak dibarengi dengan adanya pemerataan. Pada saat itu kebijakan HCI (*Heavy Chemical Industries*) yang memprioritaskan perusahaan-perusahaan besar membuat perusahaan kecil tidak dapat bersaing hingga terjadi kesenjangan sosial.

Kekuasaan Park berakhir dengan adanya kudeta oleh Kim Jae Yun dan kepemimpinannya digantikan oleh Chun Doo Hwan. Ada beberapa pergeseran kebijakan saat Chun memerintah. Chun menekankan pada adanya stabilitas ekonomi dan bukan pada pertumbuhan ekonomi, dengan memberlakukan kebijakan pengetatan pajak moneter, perusahaan yang terlibat HCI harus melakukan merger, hal ini agar mengurangi hak istimewa para pengusaha, juga menstabilkan harga, serta dibentuknya lembaga *Economic Education Bureau*. Pada masa pemerintahan Chun telah sedikit demi sedikit melepaskan intervensi

pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi. Hal ini menunjukkan tumbuhnya demokrasi di Korea. Roh Tae Woo menjadi presiden berikutnya melalui pemilihan umum secara terbuka yang menandai keberhasilan proses transisi demokrasi Korea.

Pada masa kepemimpinan Roh dibuat konstitusi baru, yang intinya adalah untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Konstitusi ini juga memberi kebebasan pada buruh untuk dapat berekspres dan mengorganisasikan diri. Pada saat ini, pemerintahan Roh menghadapi banyak tekanan yang banyak diakibatkan oleh perselisihan antara buruh dan pengusaha. Para buruh banyak melakukan mogok kerja untuk meminta kenaikan upah. Ketika upah buruh dinaikan produktivitas perusahaan menurun akibat banyaknya aksi pemogokan kerja. Hal ini mengakibatkan Korea mengalami krisis terburuk selama 20 tahun terakhir.

Keberhasilan Korea pada awalnya ditandai oleh kemampuan dan efektifitas negara dalam mengendalikan keresahan dan memobilisasi sumber daya, serta mengendalikan kelompok bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengembangkan ekonominya Korea menggunakan konsep *Developmental State Led*. Kim Young merupakan presiden ke-tujuh. Hal ini menandakan perubahan politik modern di kawasan Korea Selatan. Mandat yang diberikan adalah globalisasi dan demokratisasi. Pada masa kepemimpinan Young ada beberapa program yang dibuat untuk memaksimalkan kinerja agar dua mandat penting tersebut terpenuhi, yaitu:

1. Membentuk kabinet yang bersih (tidak terkait dengan pemerintah otiriter).
2. Melaksanakan reformasi dalam tubuh militer untuk menempatkan militer dibawah kontrol sipil.
3. Membersihkan birokrasi dari korupsi, dengan cara;
 - a. Mewajibkan pejabat mengumumkan harta kekayaannya dan keluarganya.
 - b. Mewajibkan menggunakan nama asli bagi setiap transaksi
 - c. Mengeluarkan UU yang sejalan dengan demokratisasi
4. Menetapkan kebijakan *seggyehwa* yaitu kebijakan keterbukaan pemerintah dalam bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi.
5. Adanya reformasi, deregulasi dan internasionalisasi.

Perekonomian Korea Selatan sebenarnya cukup baik sebelum terjadinya krisis ekonomi makro. Pada September 1993, Bank Dunia memberi predikat Korea Selatan sebagai salah satu “Keajaiban Asia” bersama Jepang dan Indonesia (Lavinda, 2018). Korea Selatan adalah salah satu negara dengan kekuatan ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7 hingga 9% per tahun.

Hal ini juga dapat dilihat pada dekade tahun 1990-an, ekonomi Korea Selatan tumbuh secara mengesankan yang dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 1995 yang mencapai 8,9% selama tiga kuartal pertama sebelum krisis. Selain itu, tingkat inflasi juga terkendali, sejak tahun 1993

inflasi relatif rendah, yakni antara 4% hingga 5% yang menyebabkan penurunan terhadap tingkat suku bunga nominal. Selanjutnya nilai tukar riil juga stabil. Tabungan domestik bruto juga terbilang tinggi melebihi 30% pada awal tahun 1995 hingga 1996.

Kemudian fenomena defisit fiskal tahun 1980-an yang berkisar 2,5% dari PDB meningkat menjadi surplus pada tahun 1993 dan bertahan hingga awal krisis. Anggaran pemerintah juga hampir seimbang, antara 1990 hingga 1995, defisit transaksi berjalan Korea Selatan yaitu rata-rata 1,9% dari PDB. Namun, meningkat secara signifikan pada tahun 1996 menjadi 4,7% dari PDB atau senilai hampir US\$24 miliar. Defisit transaksi berjalan juga turun menjadi 2,5% dari PDB, dan pada pertengahan 1997 menjadi sekitar US\$8,2 miliar atau 1,9% dari PDB. Sejak saat ini, gejala krisis ekonomi Korea Selatan mulai muncul (Sharma, 2003).

Berdasarkan data tahun 1997, terdapat beberapa indikator yang menyebabkan perekonomian Korea Selatan menurun dari 8,9% pada tahun 1995 menjadi 6,8% pada tahun 1996 (Annisia, 2011). Penurunan ini ditandai dengan defisit anggaran belanja yang sangat besar hingga mencapai US\$15,2 milyar hanya dalam waktu 8 bulan pertama di tahun 1996. Kondisi ini jumlahnya dua kali lipat dari anggaran pada tahun 1995. Pada kenyataannya defisit mencapai 23,7% untuk keseluruhan tahun tersebut.

Hal ini semakin ditambah lagi dengan harga komoditi ekspor Korea Selatan yang mengalami penurunan nilai produk petrokimia, baja, dan pembuatan kapal. Nilai ekspor melambat dari 33% pada tahun 1995 menjadi hanya 3% pada tahun 1996 (Saito, 1998). Kondisi ini diperparah dengan depresiasi mata uang Yen Jepang, mata uang Jepang mengalami

penurunan sebanyak 17% pada mata uang Won, sehingga membuat harga barang-barang Korea Selatan menjadi mahal di pasaran Asia Tenggara. Padahal, harga impor barang yang masuk ke Korea Selatan tidak berubah, meskipun volumenya turun sebanyak 11% sampai pertengahan tahun. Tanda-tanda lain yang menunjukkan penurunan ekonomi Korea Selatan adalah meningkatnya hutang luar negeri secara cepat karena defisit perdagangan yang terjadi.

Pada tahun 1996, hutang Korea Selatan diperkirakan sekitar US\$100 miliar kepada kreditur internasional. Hal ini semakin membuat Korea Selatan menjadi negara ketujuh dengan jumlah hutang terbesar. Beberapa pengamat menyatakan bahwa Korea Selatan terlalu cepat mengembangkan industri di luar negeri dengan bergantung pada sumber pembiayaan hutang. Meskipun utang luar negeri Korea Selatan meningkat secara signifikan pada dekade 1990-an, namun rasio utang per PDB pada tahun 1996 masih hanya 22%, yang berarti masih jauh di bawah tingkat kritis sebesar 48% yang ditentukan oleh Bank Dunia (Sharma, 2003).

Menurut Kunio Saito, selaku Direktur Regional Office for Asia and the Pacific IMF mengemukakan bahwa sejak tahun 1995 hingga awal tahun 1996 perekonomian Korea Selatan sedang dalam keadaan yang stabil. Posisi laba perusahaan kuat, investasi tinggi, dan kapasitas produktif meningkat. Namun, pada tahun 1996 permintaan eksternal melemah disertai dengan hilangnya daya saing yang dihasilkan dari depresiasi mata uang Yen. Pertumbuhan investasi juga melambat, sebagian mencerminkan ketidakpastian politik yang berlangsung menjelang pemilihan Presiden pada masa pemerintahan Kim Young-Sam. Akibatnya, posisi laba perusahaan mengalami kerugian dan mengalami masalah arus kas, termasuk untuk melunasi hutang yang terakumulasi selama masa

booming untuk membiayai investasi yang besar. Ketika pinjaman bank tidak lagi tersedia, beberapa perusahaan *Chaebol* seperti Hanbo Steel, Jinro, Dianong, New Core Group, dan KIA Motors mengalami kebangkrutan (Saito, 1998).

Untuk memperbaiki penampilan ekonominya, pemerintah Korea Selatan berusaha merubah striktur ekonomi nasional melalui reformasi regulasi di parlemen. Hal pertama yang dilakukan adalah mereformasi undang-undang (UU) mengenai perburuhan. Rancangan undang-undang (RUU) tersebut diajukan ke parlemen pada tahun 1997 untuk menghapus masa kerja seumur hidup dengan menawarkan kemungkinan pemberlakuan pemecatan (PHK). Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki tingkat persaingan perusahaan Korea Selatan (ditingkat internasional) melalui pasar angkatan kerja yang lebih terbuka. Namun demikian, kuatnya oposisi dari serikat buruh dan partai oposisi menfakibatkan RUU tersebut terbengkalai di parlemen sampai datangnya krisis.

Reformasi regulasi kedua yang dilakukan adalah membuat RUU tentang keuangan yang diajukan pada bulan agustus 1997. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mengonsolidasikan pengawasan bank-bank komersial dan dagang dalam rangka meningkatkan otonomi bank sentral Korea. Seperti RUU perburuhan, RUU keuangan ini juga terhenti di parlemen sampai terjadinya krisis. Kedua RUU ini terjegal karena sejumlah perkembangan yang terjadi sebelumnya. Yang pertama karena perusahaan Hanbo (salah satu dari 30 perusahaan besar pada masa pemerintahan Kim Young Sam) mengalami kebangkrutan pada Januari 1997 dengan utang sebesar US\$6 milyar. Ini merupakan kebangkrutan pertama dari satu konglomerat terkemuka pada dasawarsa itu. RUU perburuhan dan RUU keuangan tersebut gagal

kedua-duanya, kondisi transisional yang ditandai dengan kekuasaan sipil seolah hancur berantakan karena kebangkrutan ekonomi yang datang secara tiba-tiba.

Sebagai konsekuensinya, pembayaran kredit terhambat, aset-aset perbankan semakin menipis dan neraca perdagangan melemah. Kondisi ini mengurangi kepercayaan kreditur luar negeri yang ragu terhadap bank-bank di Korea Selatan sehingga kesulitan untuk mengumpulkan pendanaan baru. Pada saat yang sama, sejumlah bank yang terdiri dari *merchant banks*, menghadapi masalah likuiditas untuk membayar utang jangka pendek yang akan jatuh tempo. Pemerintah dan *Bank of Korea* menanggapi masalah ini dengan menyuntikkan dana likuiditas dan memperkenalkan langkah-langkah untuk memfasilitasi aliran likuiditas ke perusahaan yang sedang “sakit” tersebut. Pemerintah Korea Selatan juga mengumumkan untuk meningkatkan kepercayaan diri bank yang mengalami defisit. Meskipun demikian, langkah-langkah ini sebagian besar tidak efektif dalam memulihkan kepercayaan kreditur.

Korea Selatan saat ini telah terintegrasi ke dalam sistem pasar global, di mana faktor kepercayaan kreditur memainkan peran penting. Dalam kondisi demikian, respon kebijakan harus berubah, misalnya, menutup bank yang bermasalah. Pada umumnya, kebijakan ini membantu meningkatkan kepercayaan perekonomian dan mampu memfasilitasi pembiayaan eksternal. Namun, tetap saja tidak berkontribusi besar terhadap pemulihan ekonomi Korea Selatan. Melemahnya nilai tukar mata uang Won di pasar saham mencapai angka 10% (Saito, 1998).

Sebelumnya juga, pada akhir musim panas, pasar keuangan Korea Selatan mengalami kepanikan karena

para investor bersiap-siap menarik modal mereka. Hal ini ditambah lagi dengan krisis mata uang di Asia Tenggara yang dialami oleh Thailand dan Indonesia (Lavinda, 2018). Kondisi ini dapat dimengerti karena sebagian besar produk Korea Selatan di ekspor ke wilayah Asia Tenggara, sehingga kekacauan ekonomi yang terjadi di Asia Tenggara pasti memberikan dampak yang cukup berarti bagi Korea Selatan (Annissa, 2011).

Penyebab terjadinya krisis adalah liberalisasi keuangan yang tidak terkendali. Krisis 1997 sebagian besar disebabkan karena liberalisasi pasar dan arus modal yang mengarah pada ketergantungan berlebihan terhadap sektor swasta. Pada tahun 1997, pemerintah Korea Selatan tidak dapat menemukan cara untuk keluar dari krisis moneter yang melanda negaranya, sehingga memaksa pemerintah menerapkan program darurat dari IMF pada November 1997.

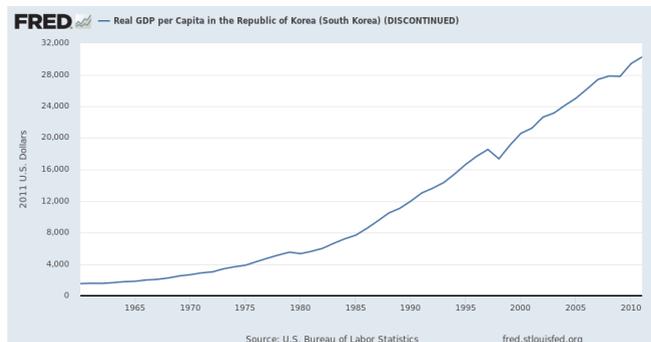
Sebagai respon terhadap kondisi pelemahan ekonomi domestik, Wakil Perdana Menteri Lim Chang-Yeol mengumumkan bahwa Pemerintah telah meminta dukungan IMF untuk melaksanakan program stabilisasi ekonomi dan reformasi kebijakan struktural. Program ini dibawa ke Dewan Eksekutif IMF dan disetujui pada 4 Desember 1997. Sejak saat itu, pemerintah Korea Selatan mulai memperkuat program tersebut atas pendampingan intensif dari Dewan IMF (Saito, 1998).

Korea Selatan tidak dapat menemukan cara lain untuk keluar dari krisis moneter yang melanda negaranya pada saat itu. Bantuan keuangan IMF senilai US\$57 miliar telah diumumkan oleh pemerintah yang terdiri dari paket darurat pertama berjumlah US\$21 miliar dan paket tambahan US\$14 miliar yang diberikan oleh *Asian Development Bank* dan *World Bank* disusul bantuan Amerika Serikat dan Jepang

dengan tambahan sebesar US\$23 miliar. Namun IMF memberikan bantuan keuangan tersebut dengan syarat bahwa Korea Selatan harus melakukan reformasi kebijakan ekonomi. Tujuan utamanya dari program ini adalah untuk menstabilkan nilai tukar dan membendung efek inflasi lain dari depresiasi mata uang.

Korea Selatan secara tidak langsung terpaksa harus berhutang kepada IMF dikarenakan kondisi perekomiannya yang terpuruk. Hal tersebut menjadikan IMF mengambil peran dalam menentukan kebijakan ekonomi Korea Selatan. Meskipun demikian, pemerintah Korea Selatan secara perlahan berhasil memulihkan negaranya dari krisis moneter tersebut dengan membayar hutang IMF tiga tahun lebih cepat dari rencana pembayaran yang disepakati. Tidak hanya itu, Pemerintah Korea Selatan juga tidak ingin bergantung pada hutang IMF. Keberhasilan Korea Selatan untuk mengatasi krisis ekonomi nasional mengembalikan citra Korea Selatan sebagai negara yang mandiri (BBC News, 2016).

Tabel 1.1 Pertumbuhan GDP per kapita di Korea Selatan



Source: U.S. Bureau of Labor Statistics

A. Keadaan Korea Selatan Sesudah Krisis Moneter

Pada awal 1998, pemerintahan Kim Dae Jung yang baru terpilih mulai mereformasi sektor keuangan yang tidak efisien dengan menggunakan empat pendekatan. Pertama pemerintah harus menutup atau menggabungkan lembaga keuangan yang bangkrut dan memperkuat basis modal “*Viabel Ones*” yang membutuhkan penghapusan *non performing loans* pada lembaga terkait dan rekapitalisasi lembaga keuangan melalui *Public Funds* maupun investasi luar negeri. Kedua, sistem regulasi perlu direformasi agar menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, deregularisasi berkelanjutan dan liberalisasi pada pasar keuangan diperlukan untuk mendukung investasi asing dan menunjukkan komitmen untuk mereformasi finansial. Terakhir, pemerintah harus mengembangkan kapasitas kelembagaan untuk melakukan reformasi ini (Moon & Mo, 2000).

Beberapa laporan menunjukkan bahwa krisis keuangan Korea Selatan pada tahun 1997 merupakan akibat dari masalah struktural yang membuat neraca lembaga keuangannya rentan terhadap guncangan eksternal. Kerentanan keuangan patut mendapat perhatian khusus, karena pemerintah Korea Selatan mengusahakan strategi pertumbuhan yang tinggi untuk meminimalisir lemahnya pengawasan keuangan dalam negeri. Oleh karena itu, langkah-langkah reformasi harus dilakukan di seluruh sektor keuangan dan perusahaan secara bersamaan. Restrukturisasi ini sangat penting karena perusahaan yang bangkrut adalah sumber masalah keuangan di Korea Selatan.

Sistem ekonomi yang berubah membuat kondisi ekonomi Korea Selatan semakin menjadi stabil. Daya saing ekspor membaik dan surplus neraca perdagangan semakin meningkat, sehingga cadangan

devisa juga semakin penuh. Hal tersebut membuat Korea Selatan dengan cepat dapat membayar utangnya ke IMF. Akhirnya, Korea Selatan berhasil melepaskan diri dari kontrol IMF pada tanggal 23 Agustus tahun 2001 dengan membayar seluruh dana penyelamatan IMF.

Setelah kepemimpinan Kim Dae Jung berakhir pada 25 Februari 2003 dan digantikan oleh Roh Moo Hyun, pemerintah dijalankan dengan fokus utama di bidang pembangunan perekonomian masih dominan mewarnai kebijakan-kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah lebih diperjelas dengan menyampaikan beberapa rencana pembangunan infrastruktur yang nantinya akan dapat mendukung kegiatan perekonomian.

Di masa pemerintahan Roo Moo Hyun ini mencoba untuk mengembangkan Korea menjadi pusat perekonomian Asia Timur Laut, beberapa cara yang diambil adalah:

1. Membuat sebuah sistem kerjasama ekonomi Asia Timur Laut
2. Mendorong pertukaran dan kerjasama ekonomi antar Korea
3. Membangun pusat logistik dan bisnis

Dalam rangka merencanakan membangun pusat logistik di Asia timur Laut melalui beberapa langkah di bawah ini:

1. Membangun bandara Internasional dan pelabuhan Incheon sebagai pusat bandara Asia timur Laut, sambil mempromosikan pelabuhan Gwangyong dan menjadi pelabuhan pusat daerah.
2. Mengembangkan bandara internasional dan pelabuhan Incheon sebagai pusat logistik wilayah metropolitan Seoul.

3. Menghubungkan kembali dua jalur kereta api dan jalan raya antar Korea yang sedang dibangun, dan membangun jaringan transportasi yang menghubungkan dengan jalur kereta api trans – cina (ICRA), dan juga membangun jaringan informasi logistik terpadu yang menghubungkan bandara dan pelabuhan pada tahun 2015.

Jika dilihat di masa pembangunan perekonomian pemerintahan Roh Moo Hyun ini, pemerintah mampu untuk menopang perekonomian dalam negerinya, akan tetapi dimasa pemerintahan Roh ini kemudian diperluas lagi sehingga potensi-potensi yang ada di luar negeri juga bisa menopang perekonomian dalam negeri Korea Selatan, salah satu jalannya adalah dengan membangun dan meningkatkan potensi infrastruktur yang ada sehingga dapat berdaya guna maksimal untuk mencapai kemajuan perekonomian.

Data resmi dari the *Organisation for Economic, Co-operation, and Development* menyebutkan bahwa sampai dengan 2014, jumlah total populasi Korea Selatan berada di angka 50,4 juta jiwa. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan di 2014 tercatat dikisaran 3.3%, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 2,9%. Selain itu, Korea Selatan mencatatkan pendapatan per kapita sebesar US\$ 34.356 (atau setara dengan Rp.446.6 juta, dengan asumsi US\$1 = Rp.13.000), kemudian jika dilihat dari umur harapan hidup (*life expectancy*) penduduk Korea Selatan memiliki usia harapan hidup yang relatif tinggi, yakni 81,2 tahun (OECDiLibrary, 2015).

Tingginya pendapatan per kapita Korea Selatan menempatkan negara ini kedalam salah satu negara maju di dunia, meskipun dengan catatan: angka ini

tidak serta-merta menunjukkan keseimbangan dari sisi distribusi pendapatan (*income distribution*). Salah satu penopang utama perekonomian Korea Selatan adalah munculnya industri-industri besar selepas perang dunia kedua. Industri-industri ini membentuk konglomerasi atau yang lebih dikenal dengan nama *Chaebol*. Kekuatan utama dari industri-industri ini adalah pada kemampuannya mengembangkan inovasi di berbagai bidang produksi.

Berikut contoh keunggulan industri besar Korea Selatan di luar negeri: industri DRAM memory chips dengan pangsa pasar global sebesar 66%. Industri LCD display dengan pangsa pasar global sebanyak 51%. Selain itu, industri telepon seluler (*smartphone*) selalu menduduki peringkat teratas dari sisi penjualan ditingkat internasional, kemudia industri pembangunan kapal yang memiliki pangsa pasar sebesar 51%, serta industri mobil dengan total penjualan lebih dari 4.7 juta kendaraan di 2011 (Choi, et al., 2013).

B. Upaya Korea Selatan Dalam Menangani Krisis Moneter Asia di Tahun 1997

Pembahasan mengenai upaya pemulihan krisis secara ketat hanya dibatasi pada era pemerintahan Kim Dae Jung saja maka perlu ditegaskan bahwa penandatanganan paket pemulihan dari IMF telah dilakukan sebelum pelantikan Kim Dae Jung sebagai presiden. Namun demikian hampir seratus persen implementasinya dilaksanakan pada masa pemerintahan Kim Dae Jung. Paket IMF ditandatangani di Seoul pada bulan Desember 1997, sedangkan Kim Dae Jung dilantik sebagai presiden pada awal bulan Februari 1998.

Korea Selatan merupakan salah satu negara yang mendapatkan pinjaman dana dari *International Monetary Fund* (IMF) ketika terjadi krisis moneter tahun 1997. Pinjaman tersebut bernilai US\$40 miliar. Walaupun Korea Selatan adalah negara yang mandiri, tetapi krisis moneter berakibat pada kemunduran ekonomi yang cukup signifikan. Sebagai contoh, perusahaan otomotif KIA Motors mengalami jatuhnya pasar saham dan mengalami kerugian yang besar. Hal itu mendorong Korea Selatan untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pasar, finansial, dan perdagangan. Oleh karena itu, keberadaan dan peran IMF dinilai sangat membantu negara-negara yang sedang mengalami krisis ekonomi seperti Korea Selatan pada tahun 1997. Peran IMF dinilai efektif dalam mengatasi permasalahan krisis moneter di Korea Selatan. Hal ini ditandai dengan bangkitnya perekonomian Korea Selatan yang lebih cepat dari negara-negara Asia lainnya.

Alasan IMF untuk membantu mengatasi krisis ekonomi Korea Selatan juga didorong oleh tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomipolitik internasional.

Dengan menggunakan sistem nilai tukar dan pembayaran internasional yang lebih terbuka dapat meningkatkan penyebaran arus modal antarnegara. Dalam aspek pengawasan, IMF memengaruhi kebijakan negara-negara anggota untuk dapat meningkatkan stabilitas ekonomi di negaranya. Sehingga, dapat mengurangi kemungkinan krisis ekonomi di kemudian hari. IMF menawarkan pinjaman terbesar US\$58 miliar kepada Korea Selatan dari semua negara di Asia Timur dengan berbagai persyaratan. Salah satunya adalah reformasi yang mendasar dari sektor ekonomi, seperti kebijakan fiskal yang ketat, neraca modal, dan liberalisasi perdagangan serta reformasi pasar tenaga kerja (Hayo & Shin, 2002).

IMF pun memiliki tujuan untuk memberikan pinjaman kepada Korea Selatan dikarenakan potensi Korea Selatan sebagai negara kesebelas dengan ekonomi terbesar di dunia dalam sistem moneter internasional. IMF memiliki fungsi dalam mengatasi krisis moneter di negara-negara, termasuk di Korea Selatan. Fungsi pertama adalah sebagai penyedia pinjaman dana bagi negara anggota IMF. Kedua, memberikan saran kebijakan dalam suatu negara yang terkena krisis moneter. Ketiga, mengatur dana bantuan bagi negara berkembang dengan tujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi makro dan menurunkan tingkat kemiskinan (Rodier, 2014). IMF juga menyediakan pembelanjaan bagi negara anggota dalam rangka melakukan reformasi struktural negara anggota.

Karena alasan tersebut IMF memberikan bantuan kepada negara-negara yang memiliki masalah dalam hal pengelolaan dana ekonomi pembangunan negaranya, salah satunya dalam krisis moneter ini yang melibatkan sejumlah negara-negara Asia termasuk Korea Selatan.

Terdapat empat upaya dari Korea Selatan terhadap menangani krisis moneter Asia di tahun 1997. Pertama, kebijakan pembentukan Badan Perencanaan Ekonomi yang bertugas untuk menyusun perencanaan dan tujuan yang ingin dicapai oleh Korea Selatan untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian serta pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Maka dari itu, pemerintah Korea Selatan sangat gencar dalam membangun infrastruktur dan juga meningkatkan stabilitas ekonominya guna mensejahterahkan masyarakatnya.

Kedua, kebijakan *Export-Oriented Industrialization* (EOI) atau kebijakan yang lebih mengutamakan kegiatan ekspor ketimbang import yang bertujuan untuk mengembangkan perusahaan industri ringan di dalam negeri yang dapat meningkatkan pendapatan negara. Kebijakan *Export-Oriented Industrialization* (EOI) juga bertujuan untuk memudahkan kegiatan ekspor dan dalam hal perkreditan bagi para eksportir.

Ketiga, kebijakan pengembangan industri berat yang bernama *Heavy Chemical Industri* (HCI) bertujuan untuk membuat kekuatan industri yang lebih mandiri. Industri ini meliputi perusahaan produsen mesin-mesin berat, kapal laut, otomotif, petrokimia, dan baja. Salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Korea Selatan tentang *Heavy Chemical Industri* (HCI) melalui industri Kapal dari perusahaan *Hyundai Heavy Industries* (HHI). Perusahaan tersebut menjadi perusahaan kapal terbesar dan tersukses di Korea Selatan dengan permintaan yang selalu meningkat pesat setiap tahunnya ditinjau dari data yang disajikan peneliti. Industri ini turut membantu kemajuan ekonomi Korea Selatan ketika mengalami Krisis Moneter karena sudah berdiri sejak tahun 1970. Sehubungan dengan berdirinya industri tersebut, Korea

Selatan akhirnya membuka empat pelabuhan (Wijaya, 2017).

Keempat, kebijakan modernisasi pedesaan yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan daerah pedesaan. Berkembangnya industri tidak sejalan dengan perkembangan pertanian di pedesaan. Sebagai respon, pemerintah Korea Selatan, Park Chung Hee, membuat sebuah gerakan *Saemaul Undong* yang berarti modernisasi desa yang menghasilkan peningkatan pendapatan petani desa.

Korea Selatan juga memanfaatkan IMF untuk mendirikan perusahaan *Multi National Cooperation* (MNC) seperti Samsung (Purba & Afrizal, 2015). Hal tersebut merupakan salah satu strategi Korea Selatan untuk dapat mengembalikan stabilitas ekonomi domestik. Dengan adanya perusahaan MNC tersebut dapat mendorong adanya kegiatan ekspor ke negara-negara lain, seperti Cina dan India sekaligus meningkatkan pendapatan bagi Korea Selatan. Jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara, seperti Thailand dan Indonesia, pemulihan ekonomi Korea Selatan pulih lebih cepat dari negaranegara lain yang juga mengalami krisis moneter tahun 1997. Bahkan, pembayaran hutang Korea Selatan sejumlah US\$58 miliar kepada IMF dapat lunas dalam jangka waktu tiga tahun lebih cepat dari yang disepakati antara Korea Selatan dan IMF. Hal tersebut mengembalikan citra Korea Selatan yang merupakan negara yang mandiri.

Adapun intervensi IMF meliputi 3 (tiga) wilayah besar, yaitu; kebijakan makro-ekonomi, restrukturisasi sektor finansial, dan beberapa bidang struktural lain. (1) Makro-ekonomi mengisyaratkan kebijakan uang ketat untuk mengurangi dampak inflasi dari depresi won, dan kebijakan fiskal ketat dalam rangka restrukturisasi sektor finansial. (2) Restrukturisasi sektor finansial,

termasuk dalam hal menutup atau merestrukturisasi lembaga-lembaga keuangan, perubahan prinsip-prinsip akuntansi ke standard internasional, menghapus utang yang tidak jelas, dan akselerasi modal asing ke dalam sektor domestik. (3) Bidang struktural yang lain adalah, liberalisasi perdagangan, liberalisasi permodalan, perubahan manajemen perusahaan, termasuk keterlibatan pemerintah dalam mengambil keputusan pinjaman bank, provisi yang lebih besar pada daya finansial, dan yang terpenting adalah memperkuat kapasitas system jaminan kerja untuk memfasilitasi pengerahan tenaga kerja dalam rangka meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja (International Monetary Fund, 1997).

Reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Kim Dae Jung sebagai Presiden Korea Selatan periode tahun 1998-2003 ditandai dengan program liberalisasi pasar keuangan untuk memperkuat arus modal investasi asing secara terbuka. Oleh karena itu, intervensi IMF dalam kebangkitan dari perekonomian Korea Selatan dianggap cukup efektif dalam membantu krisis moneter tahun 1997 bagi negaranya. Tentunya, tidak hanya bantuan dana dari IMF, tetapi etos kerja dari Pemerintahan Korea Selatan dan adanya kerja sama Perusahaan MNC Korea Selatan.